



Boikot Bayar PBB

Sorot Pemkot, Maksimalkan Potensi Sektor Lain

JOGJA, Radar Jogja - Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikeluhkan masyarakat di Kota Jogja. Sebagai bentuk tidak sepakat atas besaran kenaikan, ada masyarakat yang memilih untuk tidak membayar.

Pemicunya adalah besaran tagihan

dalam surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) naik drastis. Bahkan, ada yang naik hingga seratus persen atau dua kali lipat.

Salah seorang warga yang memutuskan untuk "memboikot" membayar PBB adalah Syarif Hidayat. Warga Janturan, Muja Muju, Umbulharjo, tersebut mengaku keberatan dengan tagihan PBB pada 2020 yang diterimanya. Dia menegaskan lebih memilih untuk tidak akan membayarnya ■

► Baca Boikot... Hal 11

NJOIP sebagai dasar pengisian PBB = 4.357.815	
NJOIP (NJOIP Tambah Pajak) = 12.000	
NJOIP untuk penghitungan PBB = 4.357.815	
PBB yang Terutang = 200% : 4.357.815.000 = 8.715.630.000	
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)	
BEBAN LAIN LAIN (Rp) 1.000.000.000	
TOTAL DIBAYAR 9.715.630.000	
JALAN DUKUN 100 SEP 2019	
TEMPAT PEMBAYARAN : BPP DIT	
JALAN DUKUN 100 SEP 2019	
JALAN DUKUN 100 SEP 2019	

NJOIP sebagai dasar pengisian PBB = 12.000.000	
NJOIP (NJOIP Tambah Pajak) = 12.000.000	
NJOIP untuk penghitungan PBB = 12.000.000	
PBB yang Terutang = 200% : 12.000.000.000 = 24.000.000.000	
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)	
BEBAN LAIN LAIN (Rp) 1.000.000.000	
TOTAL DIBAYAR 25.000.000.000	
JALAN DUKUN 100 SEP 2019	
TEMPAT PEMBAYARAN : BPP DIT	
JALAN DUKUN 100 SEP 2019	

TIGA KALI LIPAT: Surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB 2020 milik warga Muja Muju, Umbulharjo, yang naik 300 persen dari SPPT tahun lalu.

Boikot Bayar PBB

Sambungan dari hal 1

"Saya cuma mau bayar PBB kalau tanah saya jual. *Lha wong lemah meneng wae, nggo ngapa*. Soalnya nggak ada relevansinya apa-apa," kata lelaki yang biasa disapa Dayat itu saat ditemui di rumahnya kemarin (28/2).

Dayat memiliki bidang tanah rumah pribadi seluas 275 meter persegi. Tagihan SPPT PBB periode 2020 yang diterimanya naik sekitar seratus persen. Dia sangat menyayangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja dalam mengambil kebijakan. Menurutnya, kebijakan tersebut diambil tanpa sosialisasi ke masyarakat

terlebih dahulu. Apalagi, dengan kenaikan yang sangat signifikan. "*Ora ming waton gasruk*. Memang rakyatnya udah pada makmur?" ujarnya

Lelaki 65 tahun itu berpendapat jika Pemkot ingin menggali dana tidak langsung menyasar ke masyarakat. Pemkot sebaiknya memaksimalkan potensi pendapatan di bidang lain seperti reklame.

Menurut dia, selama ini rakyat sudah dibebani berbagai macam pajak. Apalagi, ditambah dengan beban kenaikan PBB yang diterapkan tanpa sosialisasi.

"Kenapa nggak gali ke situ (reklame) dulu, jelas itu dana

orang yang punya duit," tanyanya.

Dia berharap pemerintah memberi penjelasan kepada masyarakat terkait efek yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat setelah pembayaran PBB yang nilainya naik tersebut. "Jangan *cuman* diwajibkan bayar PBB tapi duitnya ke mana, untuk apa, kita nggak tahu. Kita nggak dapat apa-apa," tambah dia.

Hal senada diungkapkan Kustanto. Warga sekitar Gang Gerilya Muja-muju, Umbulharjo, tersebut menyatakan tidak merasakan efek secara langsung dari pembayaran PBB. "Bayar PBB, misalnya kesehatan kita dikover. Tapi, ini kita nggak merasakan efeknya lang-

sung," ungkapnya.

Dia mengaku tagihan yang tertera dalam SPPT 2020 mengalami kebaikan sekitar tiga kali lipat. Tahun lalu sebesar Rp 9 juta. Besaran tagihan tahun ini sebesar Rp 27 juta.

Dia merasa keberatan dengan kenaikan tagihan itu. Sebab, tanah yang menjadi objek pajak bukan dibelinya secara langsung. Tanah tersebut merupakan warisan dari orang tua. "Kalau saya beli sendiri, jelas mampu. Tapi, nyatanya enggak, *wong* hanya pensiunan," ujarnya.

Pensiunan pegawai pensiunan ini berencana tidak akan mengajukan keringanan untuk pem-

bayaran tagihan PBB terbaru. Sebab, dia mengaku tidak mampu untuk membayar meskipun diberi keringanan.

Sebelumnya, dia menyatakan pernah mengajukan keringanan sebesar 50 persen. Dari besaran permintaan keringanan itu, terealisasi 10 persen. "Nggak dikasih dan nggak saya bayar, *wong* nggak kuat (bayar). *Nyari* uang di mana? Masih tanggungan, anak-anak saya belum

mandiri. *Nek utang soyo nekak*, itu bukan solusi," imbuh laki-laki 63 tahun tersebut.

Sebelumnya, untuk memudahkan masyarakat membayar dan membantu Pemkot Jogja dalam mengoptimalkan pemungutan PBB, mulai Februari ini Bank Jogja membuka layanan pembayaran PBB. Ada tiga mekanisme yang dapat dilakukan. Yakni, tunai, tabungan bagi yang sudah memiliki rekening Bank Jogja,

dan talangan atau kredit.

"Untuk mekanisme talangan, kami berikan bunga khusus yakni 0,5 persen," kata Direktur Utama Bank sJogja, Kosim Junaedi.

Jumlah pinjaman maksimal sebesar Rp 20 juta. Jangka waktu pengembalian paling lama 24 bulan. "Untuk besaran bunga dan maksimal pinjaman, seiring berjalannya program ini akan dievaluasi-perlu tidaknya dinaikkan," tegasnya. (wia/pra/amd/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005